

DARI TANAM PAKSA KE POLITIK ETIS : DINAMIKA KEBIJAKAN KOLONIAL BELANDA DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT PRIBUMI

Rosmaida Sinaga¹, Alfiana Nurul Fadillah², Azrina Hendri³, Muhammad Ray
Jhon⁴, Mutiara Nazla Dalimunthe⁵

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Rosmaidasinaga@unimed.ac.id¹, padilapadila25@gmail.com²,

azrinahendri20@gmail.com³, jhonns880@gmail.com⁴,

nazladalimunthe8@gmail.com⁵

ABSTRACT

This paper examines the policies implemented by the Dutch colonial government in Indonesia and their impact on social, economic, and political aspects, and the emergence of nationalist awareness. After the fall of the VOC, the Dutch implemented a system known as the Cultivation System (Cultivation System) that only benefited them and caused suffering for the people. Liberal politics increased exploitation by involving private investment, while the Ethical Policy, considered a form of goodness, remained focused on Dutch interests. Indirect methods of government and divide-and-rule strategies were used to maintain their dominance by pitting society against each other. However, the experience of oppression actually gave rise to a sense of nationalism among the people and the educated class, which led to the birth of the national awakening movement, the Youth Pledge of 1928, and the struggle for independence.

Keywords: Colonial Policy, Dutch, Forced Cultivation, Ethical Policy, Indonesian Nationalism

ABSTRAK

Tulisan ini mengupas tentang kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia serta pengaruhnya pada aspek social, ekonomi, politik, dan munculnya kesadaran nasionalisme. Setelah VOC jatuh, Belanda menerapkan system yang dikenal sebagai tanam Paksa yang hanya menguntungkan mereka dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Politik Liberal memperbesar eksploitasi dengan melibatkan dari pihak swasta, Sedangkan Politik Etis yang dianggap sebagai bentuk kebaikan tetap berfokus pada kepentingan Belanda. Metode pemerintahan tidak langsung dan strategi memecah belah untuk menguasai digunakan untuk menguasai digunakan untuk menjaga dominasi mereka dengan mengadu domba masyarakat. Akan tetapi, pengalaman penindasan yang dialami justru memunculkan kesadaran akan nasionalisme diantara rakyat dan kalangan terpelajar, yang mendorong lahirnya Gerakan kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan untuk meraih kemerdekaan.

Kata Kunci: Kebijakan Kolonial, Belanda, Tanam Paksa, Politik Etis, Nasionalisme Indonesia

A. Pendahuluan

Sejarah kolonialisme di Indonesia adalah bagian yang sangat penting dalam perjalanan panjang negara ini menuju kebebasan. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda tidak hanya meninggalkan jejak penderitaan dan ketidakadilan, tetapi juga membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang sangat berpengaruh terhadap identitas bangsa Indonesia. Masuknya Belanda ke Nusantara awalnya terdorong oleh kepentingan ekonomi untuk memperdagangkan rempah-rempah melalui perusahaan dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Namun, seiring waktu, kepentingan ekonomi itu berubah menjadi ambisi untuk menguasai wilayah, sumber daya alam, dan penduduk asli. Setelah VOC bangkrut di akhir abad ke-18, semua kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang kemudian langsung mengatur pemerintahan kolonial di Hindia Belanda.

Sebagai kekuatan kolonial, Belanda menerapkan berbagai

kebijakan untuk memperkuat penguasaannya dan memaksimalkan eksploitasi sumber daya di Indonesia. Dalam aspek ekonomi, diberlakukan sistem Tanam Paksa pada abad ke-19 yang mengharuskan masyarakat menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Kebijakan ini memberikan keuntungan besar bagi Belanda, namun menyebabkan penderitaan, kelaparan, dan krisis sosial bagi rakyat. Di fase selanjutnya, dilaksanakan Politik Liberal yang memberikan peluang bagi pengusaha swasta Eropa untuk berinvestasi di negara jajahan, meskipun realisasinya justru menguatkan eksploitasi tenaga kerja pribumi. Sementara itu, Politik Etis yang muncul pada awal abad ke-20 dengan semboyan “irigasi, edukasi, dan emigrasi” hanya menjadi bentuk balas budi yang tidak tulus karena lebih menguntungkan kepentingan ekonomi kolonial dibandingkan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam politik, Belanda menjalankan sistem pemerintahan tidak langsung dengan menggunakan

struktur kekuasaan tradisional seperti raja, sultan, dan bupati untuk menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dan masyarakat. Pendekatan ini memperkuat kekuasaan Belanda karena penguasa lokal dijadikan alat kontrol terhadap masyarakatnya. Selain itu, Belanda juga menerapkan politik pecah belah untuk memecah kesatuan bangsa melalui perbedaan suku, agama, dan kelas sosial. Disparitas rasial pun dilembagakan dalam sistem sosial di mana masyarakat dibagi menjadi kelompok Eropa, Timur Asing, dan pribumi dengan hak dan status yang berbeda. Kebijakan kolonial ini berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Di satu sisi, rakyat merasakan penderitaan, eksploitasi, dan keterbelakangan. Namun, di sisi lain, pengalaman bersama di bawah penindasan itu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan perjuangan untuk mencapai kebebasan. Pendidikan yang didapat oleh sebagian kecil orang pribumi lewat Politik Etis melahirkan golongan terdidik yang menjadi penggerak pergerakan nasional dan penyebar gagasan kemerdekaan.

Oleh karena itu, mempelajari kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia sangat penting untuk memahami sejarah penindasan dan eksploitasi, serta bagaimana pengalaman kolonial tersebut menjadi titik balik dalam munculnya kesadaran nasional dan semangat kebangsaan. Dengan memahami kebijakan kolonial dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya, kita dapat melacak akar-akar ketimpangan yang masih ada hingga kini sekaligus menghargai perjuangan panjang rakyat Indonesia menuju kemerdekaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif secara deskriptif dengan cara melakukan studi pustaka. Pemilihan pendekatan ini karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia serta pengaruhnya terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, dan munculnya rasa nasionalisme. Data dikumpulkan dengan mencari berbagai sumber tertulis yang terkait, seperti buku sejarah, artikel ilmiah, jurnal akademik, dan dokumen – dokumen

yang membahas mengenai kolonialisme Belanda di Indonesia.

Analisis dilakukan secara sistematis melalui tiga (3) langkah : pertama, pengumpulan data dengan memilih literatur yang memiliki hubungan langsung dengan topik, kedua, penyaringan data untuk mengambil informasi penting yang berkaitan dengan kebijakan kolonial seperti Cultuurstelsel, politik Liberal, Politik Etis, serta strategi indirect rule dan *divide et impera*, dan ketiga, analisis deskriptif dengan menjelaskan pola, tujuan dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat Indonesia

Melalui metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang karakter, eksploitasi dalam kebijakan kolonial Belanda serta perannya dalam membentuk kesadaran nasional dan munculnya gerakan kebangsaan Indonesia.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda

Sistem Tanam Paksa atau Cultuurstelsel diperkenalkan oleh pemerintah Belanda di Hindia pada

tahun 1830, setelah Belanda kalah dalam Perang Diponegoro dan mengalami krisis ekonomi akibat perang di Belgia. Kebijakan utama dari sistem ini adalah mewajibkan penduduk Jawa untuk menyisihkan sebagian tanah mereka (biasanya 20%) untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan teh, yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial.

Dampak sosialnya terlihat dari bertambahnya beban kerja bagi masyarakat desa. Banyak petani kehilangan lahan pertanian mereka karena digunakan untuk tanaman yang diwajibkan. Masyarakat kecil sering kali harus bekerja tanpa mendapat bayaran atau dengan imbalan yang sangat sedikit. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kalangan elit lokal (bupati dan kepala desa) yang mendapat keuntungan dari sistem ini dan masyarakat kecil yang terpaksa dieksploitasi.

Dari segi ekonomi, sistem ini memberikan keuntungan besar bagi Belanda. Antara tahun 1830 dan 1870, sistem ini menyuplai hampir sepertiga dari total pendapatan negara Belanda, yang kemudian digunakan untuk membayar utang dan

pembangunan di Eropa. Di sisi lain, banyak daerah yang mengalami krisis pangan karena lahan pertanian yang subur dialihkan untuk tanaman ekspor. Kondisi ini bahkan menyebabkan kelaparan parah di beberapa wilayah di Jawa, seperti Cirebon dan Grobogan.

Dampak politik yang muncul adalah meningkatnya kekuatan kontrol kolonial. Sistem ini memanfaatkan struktur pemerintahan tradisional (bupati dan kepala desa), yang pada gilirannya memperkuat model pemerintahan tidak langsung. Rakyat tidak bisa menolak karena otoritas lokal juga ikut memaksakan kebijakan ini. Oleh karena itu, perjuangan rakyat untuk melawan sulit berkembang, kecuali untuk beberapa perlawanan lokal yang bersifat terpisah.

Alasan Mengapa Politik Liberal dan Politik Etis yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda tetap menimbulkan eksploitasi

Penerapan Politik Liberal dan Politik Etis oleh pemerintah colonial Belanda sebenarnya tetap menyebabkan penindasan, meskipun keduanya sering disebut sebagai usaha untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Hindia – Belanda. Politik Liberal yang muncul setelah diberlakukannya undang – undang Agraria 1870 memberikan kesempatan yang luas bagi pengusaha Eropa untuk berinvestasi di daerah jajahan. Dari segi ideologis, tujuan politik ini adalah untuk memberikan kebebasan dalam berbisnis, menciptakan iklim ekonomi yang modern dan mendorong pertumbuhan melalui investasi.

Namun, kenyataannya sangat jauh dari harapan tersebut. Banyak tanah subur milik warga yang disewakan atau bahkan diambil alih untuk membuat perkebunan besar seperti tebu, kopi, tembakau, dan karet. Masyarakat dipaksa untuk bekerja sebagai buruh kontrak dengan upah yang sangat rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi yang tidak layak.

Pada saat yang sama, keuntungan besar mengalir kepada pengusaha Eropa dan pemerintah Belanda, sedangkan rakyat lokal hanya menjadi korban eksploitasi. Dengan begitu, walaupun dikemas dengan istilah kebebasan ekonomi, politik liberal pada kenyataannya tetap mempertahankan penindasan sosial-

ekonomi terhadap masyarakat Indonesia.

Kondisi rakyat yang semakin menderita akhirnya memunculkan kritik keras di negeri Belanda, terutama setelah terbitnya novel *Max Havelaar* karya Multatuli yang menyingkap penderitaan petani Jawa akibat kebijakan kolonial. Dari sinilah lahir gagasan Politik Etis atau Politik Balas Budi pada tahun 1901. Politik ini dijalankan dengan tiga program utama, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Secara teoritis, politik etis dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab moral Belanda untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk jajahan setelah berabad-abad dieksploitasi. Akan tetapi, pelaksanaannya kembali menunjukkan watak kolonial yang lebih mementingkan kepentingan Belanda. Program irigasi lebih diarahkan untuk memperluas lahan perkebunan tebu milik swasta Belanda, bukan untuk sawah rakyat.

Program edukasi memang melahirkan sekolah-sekolah, tetapi aksesnya sangat terbatas hanya bagi kaum priyayi atau kelompok kecil elite pribumi, sehingga pada akhirnya lebih berfungsi untuk mencetak tenaga

administrasi murah bagi pemerintah kolonial ketimbang mencerdaskan rakyat. Sementara itu, program emigrasi atau transmigrasi justru digunakan untuk mendatangkan tenaga kerja murah dari 5 Jawa ke perkebunan-perkebunan besar di Sumatra Timur, di mana mereka sering terjebak dalam sistem kerja kontrak yang keras dan penuh penindasan.

Dengan demikian, meskipun secara retorika politik liberal dan politik etis berbeda—yang pertama berbasis kebebasan ekonomi dan yang kedua berbasis balas budi—keduanya pada hakikatnya sama-sama memperkuat struktur ekonomi kolonial yang eksploitatif. Kedua kebijakan tersebut tidak pernah berangkat dari kepentingan rakyat Indonesia, melainkan dari kebutuhan negeri Belanda untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari tanah jajahan. Rakyat pribumi tetap berada dalam lingkaran kemiskinan, keterbelakangan, dan penindasan, sementara keuntungan ekonomi sepenuhnya dinikmati oleh pemerintah kolonial dan kaum kapitalis Eropa

Strategi Pemerintah tidak langsung (Indirect Rule) serta politik divide et impera dijalankan Belanda untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan kolonial di Indonesia.

Strategi Pemerintahan Tidak Langsung dan Politik Divide et Impera dalam Memperkuat Kekuasaan Kolonial Belanda di Indonesia Selama periode penjajahan Belanda di Indonesia, metode untuk menjaga dan memperluas pengaruh kolonialnya berkembang dengan cara yang rumit. Dua pendekatan utama yang sangat penting adalah sistem pemerintahan tidak langsung dan politik pecah belah. Metode ini memungkinkan Belanda untuk mengatur area yang luas dengan banyak variasi budaya dan sosial secara efektif serta mengurangi kemungkinan terjadinya pemberontakan besar.

Sistem Pemerintah Tidak Langsung (Indirect Rule)

Sistem pemerintahan tidak langsung atau aturan tidak langsung diterapkan oleh Belanda sebagai metode yang efektif untuk mengelola daerah jajahan tanpa perlu menguasai semua lapisan masyarakat secara langsung. Pada intinya, Belanda

menggunakan penguasa lokal yang sudah ada seperti raja, sultan, atau bupati sebagai perantara untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat lokal. Cara ini terutama berkembang pada masa VOC dan terus berlanjut sampai zaman Hindia Belanda.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh NL Nur Laely pada tahun 2018, sistem administrasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Undang-Undang Desentralisasi 1922 menunjukkan pola yang bersifat paternalistik. Sistem ini mencerminkan birokrasi kolonial dengan memanfaatkan struktur tradisional yang sudah ada, yang dikenal dengan istilah politik tidak langsung. Pemimpin lokal yang sebelumnya memiliki kekuasaan dan legitimasi berdasarkan adat dan hukum kerajaan kini berfungsi sebagai perwakilan pemerintah kolonial, dengan tugas administrasi dan pengawasan terhadap masyarakat yang terbatas oleh kekuasaan Belanda. Sistem ini memungkinkan Belanda untuk mengurangi biaya pengawasan dan menghindari potensi konflik langsung antara penjajah dan penduduk (Nur Laely, 2018).

Selain alasan praktis, indirect rule dimaksudkan agar masyarakat pribumi merasa kepemimpinan mereka masih dipegang oleh penguasa yang dekat dengan adat kebiasaan dan kultur lokal meskipun realitasnya mereka berada di bawah kontrol kolonial. Dengan demikian, stabilitas sosial lebih mudah dijaga dan oposisi yang luas dapat diminimalisasi. Sistem ini juga memungkinkan terciptanya birokrasi kolonial yang memadukan unsur Eropa dan pribumi dengan struktur hierarki yang jelas, di mana residen Belanda mengendalikan penguasa lokal sebagai anak buahnya.

Pada periode Gubernur Jenderal Daendels dan dalam kepemimpinan Inggris saat Raffles, sistem residensi dan penggunaan jabatan residen diperkuat sebagai bagian penting dari administrasi daerah. Posisi pemimpin lokal masih dipertahankan sebagai simbol kekuasaan yang telah ada sejak lama, tetapi pengawasan administrasi dikuasai oleh pejabat kolonial dari Eropa. Ini memperkuat pengaturan kebijakan kolonial di berbagai sektor, yang mencakup pengumpulan pajak, pengaturan irigasi, dan perdagangan.

Sistem pemerintahan tidak langsung ini sangat penting bagi kelangsungan eksploitasi sumber daya kolonial. Di Sumatera Timur misalnya, pengakuan penghulu dan kepala adat sebagai penghubung antara masyarakat lokal dengan rezim kolonial memastikan kontrol efektif sekaligus memberi ilusi otonomi kepada masyarakat pribumi (Rosmaida Sinaga et al., 2020).

Politik Devide et Impera (Pecah Belah)

Politik pecah belah dan kuasai adalah cara yang digunakan oleh Belanda untuk memecah masyarakat supaya tidak bisa bersatu saat dijajah. Secara harfiah, istilah ini berarti "bagi dan kuasai", yang berarti menciptakan pertikaian di dalam masyarakat lokal berdasarkan perbedaan suku, agama, golongan sosial, dan kepentingan yang ada. Politik pecah belah yang diterapkan oleh Belanda memanfaatkan perbedaan suku, agama, kelas sosial, dan daerah yang memang sudah ada di Nusantara. Mereka sengaja memperburuk konflik antar kelompok ini melalui pengaturan pemimpin lokal yang dipilih secara khusus, memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu, serta menyebarkan berita yang

menciptakan kecurigaan dan persaingan.

Contoh yang jelas dari politik ini adalah partisipasi Belanda dalam persetujuan Perang Padri di Sumatera, Perang Diponegoro di Jawa, dan Perang Aceh. Dalam berbagai konflik tersebut, Belanda sering kali bertindak sebagai pihak yang tidak berpihak atau perantara sekaligus menggunakan kekuatan untuk menekan kelompok yang sulit untuk diawasi. Dengan cara ini, mereka berhasil memecah kekuatan perlawanan dan memperpanjang kuasa mereka. Politik belah dan perintah juga terlihat dari cara Belanda berinteraksi dengan pemimpin lokal yang setia sebagai sarana untuk mengawasi masyarakat. Pemimpin ini mengatur rakyat dengan aturan yang mendukung atau tidak mendukung kelangsungan sistem kolonial. Ini mengarah pada terbentuknya kelas sosial baru yang berkepentingan untuk mempertahankan keadaan yang ada, sehingga menjadi hambatan bagi persatuan nasional (Karina et al., 2024).

Dalam konteks masyarakat perkebunan di Sumatera Timur yang

disebut dalam ebook, politik *divide et impera* juga diterapkan melalui segmentasi tenaga kerja berdasarkan etnis. Buruh asal Tionghoa, Jawa, India, dan Melayu dibagi dalam pemukiman dan upah yang berbeda-beda sehingga menghambat potensi solidaritas dan pemberontakan buruh. Hal ini sekaligus mempertegas stratifikasi sosial yang dipaksakan oleh kolonial agar tidak lahir kekuatan perlawanan kolektif (Rosmaida Sinaga et al., 2020).

Interaksi Antara Sistem Indirect Rule dan Politik *Divide et Impera*

Sistem pemerintahan tidak langsung dan politik pecah belah saling mendukung dalam mekanisme kolonial Belanda. Penguasa lokal yang mengadopsi peran sebagai perantara sering kali juga menjadi alat politik pecah belah yang diaktifkan oleh kolonial. Elite lokal yang dibina oleh Belanda tidak hanya menjalankan tugas administratif tetapi juga berfungsi menjaga kebijakan politik *divide et impera* sekaligus mengatur konflik sosial sehingga tidak berkembang menjadi ancaman besar bagi kolonialisme.

Model ini memudahkan pengelolaan rumah tangga kolonial

yang rumit akibat perbedaan tingkat kematangan politik, budaya, dan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Belanda bisa menjaga stabilitas dengan fleksibilitas dan adaptasi sistem, sehingga kolonialisme dapat bertahan lama meskipun tantangan sosial dan perlawanan terus muncul (Nur Laely, 2018).

Dampak Jangka Panjang Strategi Kolonial Strategi pemerintahan yang tidak langsung serta taktik *divide et impera* memberikan efek jangka panjang yang besar terhadap sistem sosial dan politik di Indonesia. Pembagian masyarakat yang tercipta akibat politik pecah belah menimbulkan rasa curiga antara kelompok etnis, suku, dan kelas sosial yang menghambat terbentuknya kesatuan nasional yang solid pada masa perjuangan kemerdekaan. Selain itu, pembagian sosial yang ketat dan diskriminasi yang terstruktur antara kelompok elit lokal yang bekerja sama dengan masyarakat biasa menciptakan warisan ketidaksetaraan sosial hingga setelah kemerdekaan.

Dampak ini juga mempengaruhi dinamika politik Indonesia saat ini dan menimbulkan

kesulitan dalam membangun negara bangsa yang merangkul semua pihak. Namun, tantangan dari masa kolonial tersebut memicu kesadaran akan pentingnya persatuan dan kedaulatan nasional yang lebih kukuh, yang pada gilirannya mendorong munculnya gerakan nasionalisme dan perjuangan untuk merdeka di abad ke-20.

Eksplorasi dan Penderitaan Kaum Primbumi

Kebijakan kolonial seperti sistem tanam paksa mengakibatkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia, terutama petani di Jawa yang memaksa menanam tanaman ekspor dengan upah rendah atau tanpa upah. Eksploitasi ini menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan kematian rakyat sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan perlawanan rakyat yang meluas di berbagai daerah. Rasa sakit dan ketidakadilan inilah yang memupuk benih kesadaran nasionalisme sebagai reaksi terhadap meremehkan kolonial.

Kebijakan eksploitasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, terutama Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) yang memaksa rakyat pribumi untuk menanam

komoditas ekspor, menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang meluas. Penderitaan ini tidak hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, melainkan oleh seluruh lapisan rakyat, terutama di Jawa. Penderitaan kolektif inilah yang secara perlahan menumbuhkan benih-benih kesamaan nasib, yang pada gilirannya memicu keinginan untuk bersatu dan melepaskan diri dari penindasan.

Perlawanan Rakyat dan Pemersatuan Perjuangan

Berbagai perlawanan rakyat terhadap kolonial Belanda, seperti Perang Diponegoro, Perang Aceh, dan lainnya, meski belum berhasil mengusir penjajah, menunjukkan adanya semangat mempertahankan martabat dan kesejahteraan bangsa. Kegagalan perlawanan yang terpecah-pecah ini pada akhirnya menginspirasi pemikiran bahwa perjuangan nasional harus dilakukan secara bersatu, menjadi salah satu dasar munculnya nasionalisme modern Indonesia.

Meskipun perlawanan awal terhadap Belanda, seperti Perang Diponegoro (1825-1830) dan Perang Padri (1803-1838), bersifat

kedaerahan, kegagalan perlawanan-perlawanan ini memberikan pelajaran penting. Perlawanan yang dilakukan secara terpisah-pisah, tanpa adanya koordinasi nasional, tidak efektif untuk mengusir Belanda. Kegagalan ini menumbuhkan kesadaran di kalangan tokoh-tokoh pergerakan bahwa persatuan adalah kunci untuk meraih kemerdekaan.

Perubahan Sosial dan Politik Penerapan

Politik Etis (Ethische Politiek) pada tahun 1901 membuka kesempatan bagi sebagian kecil kaum pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Golongan terpelajar ini, yang berasal dari berbagai daerah dan suku, bertemu di sekolah-sekolah dan universitas, baik di Indonesia maupun di Belanda. Melalui interaksi ini, mereka mulai menyadari adanya identitas bersama sebagai "bangsa Indonesia" yang dijajah oleh kekuatan asing. Mereka kemudian menjadi motor penggerak nasionalisme modern, menyebarkan gagasan persatuan dan kemerdekaan melalui media massa, organisasi politik, dan gerakan-gerakan sosial. Kebijakan kolonial membuka pintu masuk budaya dan sistem pemerintahan

Barat serta pendidikan yang kemudian menciptakan golongan terpelajar pribumi. Golongan ini menjadi motor dalam menyebarkan ide-ide nasionalisme melalui organisasi-organisasi pergerakan dan pengajaran sejarah nasional yang menanamkan rasa kebanggaan dan kesadaran akan identitas bangsa.

Pembentukan Identitas Nasional

Sejarah nasional yang diajarkan dan dipahami sebagai pengalaman kolektif memberikan bangsa Indonesia identitas nasional yang kuat. Kesadaran ini termasuk pemahaman akan pentingnya persatuan wilayah, bahasa, ideologi, dan sistem kenegaraan sebagai dasar terbentuknya bangsa Indonesia yang merdeka. pengalaman kolektif di bawah penjajahan Belanda membentuk kepribadian dan identitas nasional yang kuat. Sejarah perjuangan melawan kolonialisme, dengan segala penderitaan dan perlawanannya, menjadi landasan fundamental bagi kesadaran nasional. Proses ini memperkokoh solidaritas di antara berbagai suku dan kelompok etnis, yang kemudian memuncak pada peristiwa-peristiwa penting seperti Sumpah Pemuda (1928) yang

menjadi tonggak penting dalam pembentukan bangsa Indonesia.

Setelah masa kolonial meningkatkan pendidikan dan interaksi dengan bangsa Eropa mempengaruhi kelompok-kelompok terpelajar untuk mengadopsi ide nasionalisme modern. Gerakan kebangkitan nasional mulai dari Boedi Oetomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, hingga perjuangan fisik kemerdekaan menunjukkan kesadaran evolusi nasional yang diperlukan pada pengalaman penderitaan kolonial dan keinginan merdeka.

E. Kesimpulan

Kebijakan kolonial Belanda di Indonesia sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20 memperlihatkan pola yang konsisten, yakni eksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan metropolitan, sementara rakyat pribumi tetap terjebak dalam kemiskinan dan penderitaan. Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) memang memberikan keuntungan besar bagi Belanda, tetapi menimbulkan dampak sosial berupa penderitaan petani, krisis pangan, dan kesenjangan sosial; dampak ekonomi berupa kemiskinan rakyat serta

kekayaan mengalir ke negeri penjajah; serta dampak politik berupa semakin kuatnya kontrol kolonial melalui pemerintahan tidak langsung.

Meski kemudian diberlakukan Politik Liberal dan Politik Etis dengan alasan modernisasi dan balas budi, pada kenyataannya kedua kebijakan tersebut tetap berorientasi pada kepentingan kolonial. Politik Liberal membuka peluang besar bagi kapitalis swasta untuk menguasai tanah dan tenaga kerja murah, sementara Politik Etis lebih banyak berfungsi sebagai legitimasi moral yang terbatas manfaatnya bagi rakyat, sebab irigasi, pendidikan, dan emigrasi tetap diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi kolonial. Untuk memperkuat kekuasaan, Belanda menerapkan strategi pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*) dengan memanfaatkan elite lokal, serta politik *divide et impera* yang memecah belah masyarakat berdasarkan etnis, agama, dan kelas sosial. Strategi ini efektif dalam menjaga stabilitas kekuasaan kolonial, tetapi meninggalkan warisan ketidaksetaraan sosial dan kecurigaan antarkelompok hingga masa setelah kemerdekaan.

Namun, ironi dari kebijakan kolonial yang menindas adalah lahirnya kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Penderitaan kolektif akibat eksploitasi, kegagalan perlawanan lokal, munculnya kaum terpelajar berkat pendidikan terbatas dari Politik Etis, serta pengalaman interaksi antarsuku dan antardaerah melahirkan kesadaran akan identitas bersama sebagai bangsa Indonesia. Kesadaran inilah yang menjadi dasar lahirnya organisasi pergerakan nasional, Sumpah Pemuda 1928, hingga perjuangan kemerdekaan 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman. (2014). *Indonesia: Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Yogyakarta: Pujangga Press.
- Sinaga, R., Simangunsong, L. E., & Syarifah. (2020). *Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Karina, K., Sitorus, O., Gurusinga, S., & Sinaga, R. (2024). *Divide Et Impera: Kebijakan Politik Belanda Dalam Memecah Persatuan di Nusantara*. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 315-318.

- Nur Laely, N.L. (2018). Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942. Universitas Negeri Makassar.
- Yudha, G. (2022). Strategi Politik Devide Et Impera Belanda dan Relevansinya dengan Polarisasi Agama Pasca Pilpres 2019 di Indonesia. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(2), 19-38.